

IMPLIKASI UTANG PUBLIK TERHADAP PERTUMBUHAN HIJAU: EVALUASI KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Wulan Kusuma Wardani¹, Hilbra Akbar Ramadhan², Muhammad Koswara³, Anas Malik⁴
^{1,2,3,4} Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung

E-mail: wulankusuma356@gmail.com¹, hilbraakbarramadhan@gmail.com²,
muhammadkoswara08@gmail.com³, anasmalik@radenintan.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implikasi utang publik terhadap pertumbuhan hijau di Indonesia dengan menganalisis dinamika utang, kebijakan fiskal hijau, dan instrumen pembiayaan berkelanjutan. Peningkatan utang pascapandemi menopang stabilitas ekonomi, tetapi mempersempit ruang fiskal akibat tingginya beban bunga. Temuan penelitian menunjukkan bahwa instrumen seperti green sukuk berkontribusi pada pengurangan emisi dan rehabilitasi lingkungan, sementara Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) memperkuat arah pembiayaan hijau. Namun, tantangan struktural seperti ketergantungan energi fosil, kapasitas fiskal yang terbatas, dan belum optimalnya integrasi kebijakan fiskal hijau masih menghambat percepatan transisi ekonomi hijau. Secara keseluruhan, utang publik berpotensi menjadi katalis pembangunan rendah karbon apabila didukung reformasi fiskal dan perluasan instrumen pembiayaan hijau.

Kata Kunci: Utang publik; Fiskal hijau; Green sukuk; TKBI; Pertumbuhan hijau.

Abstract

This study examines the implications of public debt on green growth in Indonesia by analyzing debt dynamics, green fiscal policies, and sustainable financing instruments. Post-pandemic debt increases support economic stability but narrow fiscal space due to high interest burdens. The findings show that instruments such as green sukuk contribute to emission reduction and environmental rehabilitation, while the Indonesian Sustainable Finance Taxonomy (TKBI) reinforces the direction of green financing. However, structural challenges such as dependence on fossil fuels, limited fiscal capacity, and suboptimal integration of green fiscal policies still hinder the acceleration of the green economic transition. Overall, public debt has the potential to be a catalyst for low-carbon development if supported by fiscal reforms and the expansion of green financing instruments.

Keywords: Public debt; Green fiscal policy; Green sukuk; TKBI; Green growth.

Article history

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism checker no 1328
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Utang publik merupakan instrumen penting untuk membiayai pembangunan nasional, terutama ketika Indonesia membutuhkan pendanaan besar bagi pertumbuhan ekonomi dan agenda transisi hijau. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan utang banyak dipengaruhi kebijakan fiskal ekspansif untuk pemulihan pascapandemi dan percepatan pembangunan berkelanjutan (Pangestoeti, 2025). Namun, muncul kekhawatiran mengenai kemampuan pemerintah menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus memenuhi komitmen menuju ekonomi hijau. Meskipun utang publik menopang pembiayaan infrastruktur dan program strategis, beban bunga yang tinggi dapat mempersempit ruang fiskal yang dibutuhkan untuk investasi sektor hijau (Bachtiar et al., 2015), sehingga diperlukan evaluasi lebih mendalam terkait perannya terhadap agenda pertumbuhan hijau Indonesia.

Tantangan keberlanjutan fiskal semakin menonjol setelah pandemi COVID-19, ketika defisit anggaran melebar dan rasio utang meningkat untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kondisi ini memunculkan risiko jangka panjang berupa tekanan ruang fiskal dan potensi tertundanya investasi hijau. Pada saat yang sama, agenda global menekankan pentingnya *green growth* sebagai strategi pembangunan rendah karbon, termasuk transisi energi dan dekarbonisasi (Gibbs, 2024). Dengan demikian, utang publik tidak hanya berfungsi sebagai alat pembiayaan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan berkelanjutan suatu negara.

Dalam konteks Indonesia, berbagai kajian menunjukkan bahwa beban fiskal seperti bunga utang, subsidi, dan belanja rutin membatasi alokasi untuk proyek energi terbarukan. Sementara itu, komitmen terhadap *Paris Agreement*, *SDGs*, dan target *Net Zero Emission 2060* menuntut dukungan fiskal yang lebih kuat (Zainul Bahri et al., 2023). Inovasi pembiayaan seperti green sukuk telah membantu rehabilitasi hutan dan penurunan emisi, dan penerapan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) memberikan pedoman melalui klasifikasi aktivitas “Hijau” dan “Transisi”. Namun, kajian akademik yang secara langsung menghubungkan utang publik dan pertumbuhan hijau masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis implikasi utang publik terhadap pertumbuhan hijau melalui perspektif kebijakan fiskal dan instrumen pembiayaan hijau (Hafizd et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk menganalisis keterkaitan utang publik, kebijakan fiskal hijau, dan pertumbuhan hijau di Indonesia melalui penelaahan literatur ilmiah, laporan pemerintah, serta dokumen kebijakan yang relevan. Ruang lingkup penelitian mencakup dinamika utang publik, pengembangan instrumen pembiayaan hijau seperti green sukuk, serta peran Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) dalam periode 2015-2024. Data yang digunakan sepenuhnya bersumber dari dokumen sekunder, termasuk APBN, statistik utang, laporan *fiscal risk*, *Green Sukuk Allocation & Impact Report*, dokumen TKBI OJK, dan publikasi lembaga internasional seperti IMF dan World Bank. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumenter dan literature review sistematis terhadap konsep utang publik, kebijakan fiskal hijau, dan ekonomi hijau. Analisis dilakukan secara deskriptif, tematik, dan komparatif sebelum disintesis untuk menilai implikasinya terhadap transisi ekonomi berkelanjutan. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber untuk memastikan konsistensi informasi antar laporan resmi, literatur akademik, dan publikasi internasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Utang Publik

Utang publik merupakan kewajiban negara yang digunakan untuk menutup defisit fiskal sekaligus membiayai pembangunan ketika penerimaan tidak mencukupi. Instrumen ini berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja produktif seperti infrastruktur dan layanan publik. Secara makro, utang publik dapat meningkatkan kapasitas produksi nasional apabila dialokasikan secara efisien. Namun, peningkatan utang yang tidak terkendali berpotensi menekan keberlanjutan fiskal karena meningkatnya beban bunga dan kewajiban pembayaran. Risiko keberlanjutan tersebut semakin besar ketika dipengaruhi faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar dan suku bunga global, yang dapat membatasi ruang fiskal pemerintah untuk pembangunan berkelanjutan (Nelson, 2013). Karena itu, manajemen utang publik perlu diarahkan agar tetap menjaga fleksibilitas fiskal, terutama untuk mendukung pembiayaan agenda hijau.

Kebijakan Fiskal dan Perannya dalam Pembangunan

Kebijakan fiskal merupakan alat utama pemerintah untuk menstabilkan perekonomian melalui pengaturan belanja negara, pajak, dan subsidi. Kebijakan ini dapat bersifat ekspansif untuk mendorong aktivitas ekonomi atau kontraktif untuk menjaga stabilitas harga (Arkaan & Yulianto, 2025). Belanja produktif terbukti memberikan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama ketika diarahkan pada sektor strategis seperti pendidikan, infrastruktur, dan inovasi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas tata kelola, ketepatan sasaran, dan kemampuan pemerintah mengelola risiko makroekonomi. Di negara berkembang seperti Indonesia, kebijakan fiskal menghadapi keterbatasan ruang akibat tingginya pembayaran bunga utang dan fluktuasi penerimaan pajak. Selain itu, tantangan global seperti volatilitas harga energi dan ketidakpastian ekonomi turut mengurangi fleksibilitas fiskal untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan hijau.

Kebijakan Fiskal Hijau (*Green Fiscal Policy*)

Kebijakan fiskal hijau mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam kebijakan anggaran untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini mencakup internalisasi biaya lingkungan, pengalihan subsidi dari energi fosil ke energi bersih, dan penerapan insentif untuk teknologi hijau (Ammar et al., 2024). Instrumen seperti pajak karbon, perdagangan emisi, dan insentif energi terbarukan berfungsi menekan emisi serta meningkatkan efisiensi energi. Kebijakan ini juga terbukti memperluas ruang fiskal melalui pengurangan biaya lingkungan dan pertumbuhan sektor hijau. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti resistensi politik, rendahnya investasi awal, dan kelembagaan yang belum memadai. Negara berkembang juga menghadapi tantangan distribusi beban agar kebijakan green fiscal tidak membebani kelompok berpendapatan rendah.

Instrumen Pembiayaan Hijau

Instrumen pembiayaan hijau berfungsi mendukung transisi energi dan mitigasi perubahan iklim melalui pembiayaan proyek yang ramah lingkungan. Green sukuk menjadi instrumen utama yang digunakan Indonesia untuk membiayai energi terbarukan, rehabilitasi hutan, dan efisiensi energi (Putra et al., 2025). Selain itu, *sustainability bond* menyediakan mekanisme pembiayaan yang mendukung tujuan lingkungan sekaligus sosial, menjadikannya alat penting dalam pembangunan berkelanjutan. *Blended finance* juga berperan strategis dengan menggabungkan dana publik dan swasta untuk memperkecil risiko investasi pada proyek hijau. Meskipun memiliki dampak positif terhadap percepatan transisi energi dan pengurangan emisi,

efektivitas instrumen pembiayaan ini tetap bergantung pada tata kelola fiskal, integrasi kebijakan lintas sektor, dan kepastian regulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan utang publik Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan tren kenaikan yang signifikan, terutama akibat kebijakan fiskal ekspansif pada masa pemulihan pascapandemi COVID-19 (Limanseto, 2021). Peningkatan defisit hingga melampaui 6 persen PDB pada tahun 2020 diikuti oleh penerbitan SBN sebesar Rp2.788 triliun sepanjang 2020-2022, yang berfungsi menjaga kestabilan ekonomi nasional namun menimbulkan tekanan serius terhadap ruang fiskal (Greace Havana Tamba et al., 2024). Beban pembayaran bunga dan kewajiban utang lainnya terus meningkat sehingga mempersempit kapasitas pemerintah dalam membiayai belanja produktif, termasuk pembangunan berkelanjutan. Nelson, (2013) menegaskan bahwa meningkatnya kewajiban utang akan mempersempit fleksibilitas anggaran dan meningkatkan risiko keberlanjutan fiskal jangka panjang. Dengan demikian, persoalan utang publik di Indonesia bukan hanya menyangkut lonjakan nominal, tetapi juga berkaitan langsung dengan kemampuan negara mendukung agenda pertumbuhan hijau.

Pandemi COVID-19 juga menyebabkan pergeseran prioritas fiskal yang membuat berbagai program rendah karbon tertunda, karena pemerintah mengalihkan sebagian besar belanja untuk penanganan krisis kesehatan dan pemulihan ekonomi. Situasi ini sejalan dengan temuan Pangestoeti (2025) bahwa stabilisasi fiskal jangka pendek lebih diutamakan dibandingkan agenda iklim. Namun, pada fase pemulihan, pemerintah kembali menempatkan utang publik sebagai instrumen strategis dalam mendukung pembangunan rendah karbon, khususnya untuk mempercepat energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada sektor intensif karbon (Anwar, 2022). Kebutuhan investasi transisi energi yang sangat besar tidak dapat ditutupi oleh APBN saja, sehingga perluasan instrumen pembiayaan hijau menjadi semakin penting. Dengan demikian, utang publik kini memainkan peran ganda: menjaga stabilitas makro sekaligus menjadi katalis pembiayaan pertumbuhan hijau.

Implementasi kebijakan fiskal hijau menjadi bagian penting dari strategi tersebut. Penerbitan green sukuk menempatkan Indonesia sebagai pionir global dalam instrumen utang ramah lingkungan, dengan dampak nyata berupa penurunan emisi 2,77 juta tCO₂e, rehabilitasi 74.024 hektare hutan dan lahan, serta kontribusi terhadap 11 tujuan SDGs (Putra dkk., 2025; Febriansyah dkk., 2025). Namun, kapasitas fiskal domestik masih terbatas karena APBN periode 2016-2023 hanya mampu menutup 12,3 persen kebutuhan pembiayaan iklim nasional, sehingga mempertegas urgensi penguatan instrumen pendanaan hijau. Kebijakan fiskal hijau juga berperan mengalihkan investasi dari sektor berbasis karbon menuju energi terbarukan, sejalan dengan arah pembangunan ekonomi hijau Indonesia.

Dalam konteks tata kelola pembiayaan, Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) hadir sebagai instrumen penting untuk memastikan selarasnya penggunaan utang publik dengan agenda rendah karbon. Melalui klasifikasi aktivitas “Hijau” dan “Transisi”, TKBI menetapkan standar bahwa proyek yang dibiayai harus mendukung prinsip DNSH, jalur *Net Zero Emission*, dan pemenuhan aspek sosial (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Aktivitas transisi yang belum sepenuhnya hijau pun tetap diakui selama memiliki arah perbaikan yang jelas. TKBI berperan mencegah *greenwashing*, memperkuat kredibilitas instrumen pembiayaan hijau, dan memastikan bahwa kebijakan fiskal benar-benar mendorong percepatan pertumbuhan hijau nasional (Judijanto & Muthalib, 2025).

Meskipun demikian, integrasi antara utang publik dan pertumbuhan hijau menghadapi sejumlah tantangan struktural dan kebijakan. Ketergantungan terhadap energi fosil tetap tinggi

sehingga memperlambat laju transisi energi, sementara alokasi fiskal untuk energi terbarukan masih jauh dari target dekarbonisasi. Keterbatasan ruang fiskal juga membuat kapasitas utang publik tidak selalu mampu menopang pembiayaan iklim secara optimal, terutama dalam kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Selain itu, instrumen fiskal hijau seperti pajak karbon, reformasi subsidi energi fosil, dan *green budgeting* masih belum sepenuhnya terintegrasi dalam perencanaan jangka Panjang (Kementerian PPN/Bappenas, 2020). Keterbatasan kajian empiris mengenai hubungan langsung antara utang publik dan pertumbuhan hijau juga menjadi hambatan dalam perumusan kebijakan berbasis bukti. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan, reformasi fiskal hijau yang lebih progresif, dan riset lanjutan untuk mendukung integrasi kebijakan secara efektif.

Di sisi lain, peluang strategis penguatan hubungan antara utang publik dan pertumbuhan hijau semakin terbuka seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan transisi energi nasional. Utang publik dapat berfungsi sebagai pendorong percepatan investasi di sektor energi terbarukan, efisiensi energi, dan program mitigasi perubahan iklim Melalui pendekatan fiskal hijau, pembiayaan berbasis utang dapat diarahkan lebih sistematis untuk mendukung target iklim nasional. Selain itu, potensi ekspansi green sukuk, *sustainability bond*, dan *blended finance* menjadi peluang besar di tengah meningkatnya minat investor global terhadap instrumen ramah lingkungan. Penguatan implementasi TKBI juga meningkatkan kredibilitas pembiayaan hijau, meminimalkan risiko greenwashing, dan mendorong percepatan transformasi menuju ekonomi rendah karbon. Dengan kombinasi pendekatan tersebut, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengintegrasikan kebijakan fiskal dan instrumen utang publik sebagai motor utama akselerasi pertumbuhan hijau.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa utang publik berperan penting dalam pembiayaan pembangunan dan menjadi instrumen strategis untuk mendukung agenda pertumbuhan hijau di Indonesia. Peningkatan utang selama pemulihan pascapandemi menjaga stabilitas ekonomi, tetapi menimbulkan tekanan pada ruang fiskal akibat meningkatnya beban bunga dan kewajiban rutin negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan utang harus mempertimbangkan keberlanjutan fiskal dan kebutuhan pendanaan transisi energi. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa instrumen fiskal hijau seperti green sukuk memberi kontribusi nyata bagi pengurangan emisi dan rehabilitasi lingkungan, sementara penerapan TKBI memperkuat tata kelola pembiayaan hijau agar lebih terarah dan bebas dari praktik *greenwashing*. Meskipun demikian, berbagai tantangan seperti ketergantungan energi fosil, kapasitas fiskal yang terbatas, dan belum optimalnya integrasi kebijakan fiskal hijau masih menjadi hambatan utama. Secara keseluruhan, utang publik memiliki potensi besar untuk menjadi katalis percepatan transisi menuju ekonomi rendah karbon. Namun, keberhasilan integrasi ini bergantung pada reformasi fiskal yang lebih progresif, penguatan kelembagaan, serta perluasan instrumen pembiayaan hijau agar kebijakan fiskal mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus keberlanjutan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ammar, Z., Yeni, M. I., Diskhamarzeweny, S., Andriani, R., & Emri, Y. (2024). *Ekonomi Hijau Sebagai Strategi Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia : Literatur Review*. 1, 1-12. <https://doi.org/10.36378/khitmah.v6i1.4050>
- Anwar, M. (2022). Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan

- Multilateral. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(15), 343-356.
<https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1905>
- Arkaan, A. B., & Yulianto, H. (2025). Tinjauan kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi review of fiscal policy and economic growth. *Jurnal Intelek Cendikia*, 2(2), 4196-4207.
- Bachtiar, H. F., Sofilda, E., & Kusumastuti, S. Y. (2015). Pembayaran Bunga Utang , Dan Subsidi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1999-2013. *Seminar Nasional Cendekiawan 2015*, 682-688.
- Gibbs, D. (2024). *Green growth* (pp. 34-50). Edward Elgar Publishing.
<https://doi.org/10.4337/9781789904833.00011>
- Greace Havana Tamba, Tarigan, G., Simanjuntak, H. I., Br Siahaan, V. T., Hamonangan Siallagan, & Christnova Hasugian. (2024). Analisis Pengaruh Pembiayaan Surat Berharga Negara (SBN) Terhadap Tingkat Kemiskinan Indonesia: Masa Normal Dan Masa Pandemi Covid-19 (2020-2023). *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 10(1), 151-[160](https://doi.org/10.38204/jrak.v10i1.1813).
<https://doi.org/10.38204/jrak.v10i1.1813>
- Hafizd, J. Z., Janwari, Y., & Al-Hakim, S. (2024). Kebijakan Fiskal di Indonesia: Analisis Hukum Keadilan Ekonomi dan Implikasi bagi Pembangunan Berkelanjutan. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 146-167.
<https://doi.org/https://doi.org/10.69768/ji.v3i2.58>
- Judijanto, L., & Muthalib, D. A. (2025). The Role of Green Fiscal Policy in Supporting Green Governance and Green Economic Development. *Journal of Islamic Economy*, 2(2), 45-52.
<https://doi.org/10.62872/seqntv12>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Kajian Cepat Pemetaan Kebijakan & Anggaran Pembangunan Rendah Karbon*.
- Limanseto, H. (2021). *Refocusing Anggaran dan Inovasi Pemerintah Daerah untuk Minimalisir Dampak Pandemi Covid-19*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
<https://ekon.go.id/publikasi/detail/3262/refocusing-anggaran-dan-inovasi-pemerintah-daerah-untuk-minimalisir-dampak-pandemi-covid-19>
- Nelson, R. M. (2013). *Sovereign Debt in Advanced Economies: Overview and Issues for Congress*.
<https://www.hsdl.org/?view&did=702006>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia. In *Otoritas Jasa Keuangan*. www.ojk.go.id
- Pangestoeti, W. (2025). Kebijakan Fiskal dan Pengelolaan Utang Publik: Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 4(1), 633-640.
<https://doi.org/https://doi.org/10.54923/researchreview.v4i1.200>
- Putra, E., Nusamuda Pratama, I., Dinar Sulistiya Ningrum, S., Lestari, N., Ari Azhari, M., Aslan, M., Putra Sarkila, A., & Kartika, P. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL HIJAU DALAM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA: PELUANG DAN TANTANGAN UNTUK TRANSISI EKONOMI BERKELANJUTAN DI INDONESIA Implementation of Green Fiscal Policy in The State Revenue Budget: Opportunities and Challenges for A Sus. *Nusantara Hasana Journal*, 4(9), 39-51. <https://doi.org/https://doi.org/10.59003/nhj.v4i9.1316>
- Zainul Bahri, SE and Aprilianti, DR Vinni and SSTP, M. and others. (2023). *Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan Pemahaman Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Klasik, Neoklasik, Islam, Green Economy, dan Blue Economy*. Nas Media Pustaka.